

TRANSFORMASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN MAHASISWA MENYELESAIKAN STUDI DI ERA AI

Yahya Antu¹, Zuchri Abdussamad², Arifin Tahir³

Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3}

yahyaantu03@gmail.com¹,

ABSTRAK

Transformasi teknologi khususnya Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan tinggi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia bertransformasi dalam rangka meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penyelesaian studi di era AI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka yang mencakup kebijakan nasional dan internasional, laporan akademik, serta literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip digitalisasi, peningkatan literasi AI, dan fleksibilitas kurikulum untuk mendukung penyelesaian studi mahasiswa. Namun, implementasi kebijakan ini masih dihadapkan pada kendala seperti ketimpangan akses teknologi, kesiapan dosen, dan kesiapan mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan berbasis pemerataan akses, pengembangan kompetensi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri.

Keywords: AI, Kebijakan Publik, Penyelesaian, Studi, Transformasi Digital

ABSTRACT

Technological transformation, especially Artificial Intelligence (AI), has brought significant changes in the world of higher education. This article aims to examine how higher education policy in Indonesia has transformed in order to improve students' ability to complete their studies in the AI era. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature study method that includes national and international policies, academic reports, and related literature. The results of the study show that higher education policies in Indonesia have adopted the principles of digitalization, AI literacy improvement, and curriculum flexibility to support student study completion. However, the implementation of this policy is still faced with obstacles such as inequality of access to technology, lecturer readiness, and student readiness. Therefore, it is necessary to strengthen policies based on equal access distribution, digital competency development, and collaboration between the government, universities, and industry.

Keywords: AI, Public Policy, Study Completion, Digital Transformation

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang dipicu oleh perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) telah mengubah paradigma pendidikan tinggi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pendidikan tinggi dituntut tidak hanya menyiapkan lulusan yang kompeten, tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dan penyelesaian studi (Creswell & Creswell, 2017). Kebijakan publik di sektor pendidikan tinggi, terutama yang berkaitan dengan transformasi digital, menjadi

Yahya Antu, Cs: Transformasi Kebijakan Pendidikan Tinggi

Page. 49

instrumen penting dalam mengarahkan adaptasi tersebut (Pasolong, 2013).

Berbagai kebijakan telah dicanangkan, seperti program *Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*, digitalisasi sistem akademik, hingga penguatan literasi AI dalam kurikulum. Namun, penyelesaian studi mahasiswa, terutama pada jenjang sarjana (S1), masih menjadi tantangan, dengan angka kelulusan tepat waktu yang cenderung rendah (Sugiyono, 2013). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi kebijakan pendidikan tinggi mendukung kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan studi di era AI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan melalui telaah literatur dari kebijakan nasional (seperti Permendikbudristek), laporan akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan internasional terkait transformasi digital pendidikan tinggi. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola kebijakan dan hambatan yang muncul dalam implementasinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tinggi Indonesia telah mengadopsi elemen digitalisasi, termasuk penggunaan AI dalam pembelajaran daring, sistem informasi akademik terintegrasi, serta penguatan kurikulum berbasis kompetensi digital (Dunn, 2014). MBKM menjadi salah satu kebijakan yang mendorong fleksibilitas studi dan pemanfaatan teknologi, di mana mahasiswa dapat mengambil mata kuliah lintas prodi dan memanfaatkan platform digital.

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah, kesiapan dosen dalam mengintegrasikan AI ke dalam pembelajaran, serta keterbatasan literasi digital mahasiswa (Katili & Tueno, 2020). Selain itu, belum semua perguruan tinggi memiliki sistem penjaminan mutu yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan publik yang mengedepankan pemerataan akses, pelatihan literasi AI, dan penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi dengan industri teknologi untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung penyelesaian studi.

Menurut Zuchri Abdusamad, transformasi kebijakan pendidikan tinggi harus mempertimbangkan *aspek partisipasi dan responsivitas kebijakan yang mendukung kesiapan mahasiswa dan dosen dalam menghadapi era digital dan AI*. Abdusamad menekankan pentingnya penguatan literasi digital, kurikulum yang adaptif, dan kebijakan berbasis bottom-up yang memungkinkan masukan dari pemangku kepentingan (Abdusamad, 2018).

Di sisi lain, Arifin Tahir menekankan pada *dimensi tata kelola kebijakan yang berbasis pada prinsip good governance dan keterpaduan kebijakan antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri* (Tahir, 2020). Tahir berpendapat bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tinggi bergantung pada adanya regulasi yang jelas, sistem pengawasan yang ketat, dan keberlanjutan program, termasuk pelatihan literasi AI bagi mahasiswa dan dosen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia cenderung mengadopsi kedua teori tersebut secara parsial. Di satu sisi, kebijakan seperti *Merdeka Belajar Kampus*

Merdeka (MBKM) mencerminkan prinsip Abdusamad dengan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengambil kuliah lintas program studi dan belajar di luar kampus. Di sisi lain, regulasi penguatan digitalisasi sistem informasi akademik dan penyusunan roadmap AI di perguruan tinggi mengadopsi gagasan Tahir tentang perlunya tata kelola kebijakan yang solid.

Osborne dan Gaebler (1992) Dalam *Reinventing Government*, Osborne dan Gaebler menekankan pentingnya pemerintahan yang adaptif dan inovatif dalam memberikan layanan publik, termasuk pendidikan. Prinsip adaptabilitas dan orientasi hasil menjadi dasar bagi transformasi kebijakan pendidikan tinggi di era AI.

Denhardt dan Denhardt (2000) Dalam *New Public Service*, Denhardt menekankan partisipasi dan pemberdayaan sebagai kunci keberhasilan kebijakan publik, yang relevan dengan pengembangan kebijakan pendidikan tinggi yang mendukung kemampuan mahasiswa menyelesaikan studi dengan memanfaatkan teknologi.

Bovaird dan Löffler (2009) Dalam kerangka *Public Management and Governance*, Bovaird menggarisbawahi pentingnya kolaborasi multi-aktor dalam implementasi kebijakan. Ini sejalan dengan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri teknologi AI untuk mendukung mahasiswa.

Creswell dan Creswell (2017) Menekankan perlunya pendekatan sistematis dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, mendukung pentingnya digitalisasi dan pembaruan kurikulum.

Pasolong (2013) Mengemukakan teori kebijakan publik berbasis nilai-nilai partisipasi, responsivitas, dan efektivitas dalam mencapai tujuan kebijakan pendidikan, yang menjadi dasar bagi penguatan regulasi dan pelaksanaan program literasi AI dan MBKM.

SIMPULAN

Transformasi kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia di era AI telah membawa peluang dan tantangan dalam mendukung kemampuan mahasiswa menyelesaikan studi. Kebijakan seperti MBKM dan digitalisasi sistem akademik merupakan langkah positif, namun implementasinya masih perlu diperkuat melalui pemerataan akses, pelatihan literasi digital, dan kolaborasi multisektor. Penguatan kebijakan publik yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif dan inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dunn, W. N. (2014). *The Process of Policy Analysis*. Pearson Education Limited.
- Katili, A. Y., & Tueno, N. S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pengaturan Pengoperasian Kendaraan Bentor sebagai Moda Transportasi di Provinsi Gorontalo. *PJIA*, 9(1), 46–54.

Pasolong, H. (2013). *Teori Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2013). Statistika untuk Penelitian. Alfabeta.

Abdusamad, Z. (2018). Responsivitas Kebijakan Pendidikan dan Transformasi Digital. Jurnal Ilmu Pendidikan.

Tahir, A. (2020). Good Governance dan Kebijakan Pendidikan Tinggi. Jurnal Kebijakan Pendidikan.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. Addison-Wesley.

Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2000). The New Public Service: Serving, Not Steering. Public Administration Review.

Bovaird, T., & Löffler, E. (2009). Public Management and Governance. Routledge.